

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ashary. *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995, hlm. 30-33.
- Arief Budiman. *Negara dan Pembangunan. Studi tentang Indonesia dan Korea*. Jakarta: Yayasan Padi Dan Kapas, 1991.
- A. Prasetyantoko. *Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neo-Liberal*. Jakarta: Penerbit Kompas 2009, hlm. 143 – 145
- Boediono. *Ekonomi Indonesia, Mau Kemana?.* Kumpulan Esai Ekonomi. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Bekerjasama dengan Freedom Institute, 2009.
- Chaidir Ali dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 26. No 1 Tahun 2007.
- DR.Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius: Yogyakarta (anggota IKAPI), 1982.
- Fred B.G.Tumbuan, S.H., *Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No. 1*, 1998.
- Hartono, Ny. Siti Soemarti. *Seri Hukum Dagang. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Cet. Ke-II. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Fifth Ed., St. Paul Minn: West Publishing Co., 1979
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- , *Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum*. Buku II. AAG. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, eds.. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

John Henry Merryman, *The Civil Tradition, An Introduction to The Legal System of Western and Latin Amerika*, California: Stanford University Press, 1969.

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

-----*Kewajiban dan Standar Pelaporan Dalam Kepailitan & Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*. Loka Karya dua hari, 18-19 November 2003, Hotel Arya Duta, Jakarta. Tim Editor, Ketua: Emmy Yuhassarie, 2004.

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2003.

Nitisastro, Widjojo. *Pengalaman Pembangunan Indonesia. Kumpulan Tulisan dan Uraian*. Kata Sambutan oleh Emil Salim. Jakarta: Kompas, 2010

----- *Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum*. Buku II. AAG. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, eds.. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988

Lev. Daniel S., *Hukum Dan Politik di Indonesia. Kesenambungan dan Perubahan*. Nirwanto dan AE Priyono, penerj. Jakarta: KP3ES, 1990.

Noviana, Nina. *Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun Ke-36 No.2 April – Juni 2006*.

Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Buku ke-8 tentang Perwaditan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: penerbit Djambatan, cet. Ke-3, 191992.

R. Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke-II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, [Eds.], *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit: Alumni, Bandung, 2001.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Setangkai Bunga Sosiologi. Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi, eds. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Setiawan, *Kepailitan serta Aplikasi Kini*, tata Nusa, Jakarta, 1999.

Sri Rejeki Hartono dan Husni Syawali, eds, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sunaryati Hartono, C.F.G.. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991
Herbert L.Parker, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2002.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Soedarjadi, SH, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan Bagi Pengusaha, Pekera dan Calon Pekerja*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2008.

Soepomo. R, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Cet. Ke-15. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang No. 1 Tahun 1998.

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang No. 1 Tahun 1998, Tentang Undang-Undang tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348 Tentang Peraturan Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. INTERNET

<http://studihukum.wordpress.com/2008/11/11/hukum-ketanagakerjaan/>, di download tanggal 11 juni 2012.

<http://dennyfras.blogspot.com/2011/05/sistematika-hukum-perdata-di-indonesia.html> di download tanggal 9-6-2012.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm_kelelung.pdf di download tanggal 11 juni 2012.

<http://www.scribd.com/doc/64838818/Kedudukan-Buruh-Dalam-Kepailitan> di download tanggal 10 Juni 2012.

<http://www.scribd.com/doc/44033954/hukum-perburuhan> di download tanggal 10 Juni 2012.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1522/1/hkmadm-kelelung.pdf> di download tanggal 11 Juni 2012.

D. JURNAL

Chaidir Ali dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 26. No 1 Tahun 2007.